

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Pada Era globalisasi saat ini memberikan dampak pertumbuhan ekonomi yang signifikan disetiap Negara termasuk Indonesia. Antara lain yaitu peran dari pemerintah dalam meningkatkan investasi dalam negeri yang membuat banyaknya investor asing berani untuk menanamkan modalnya di Indonesia. Dengan ini dapat menciptakan persaingan serta perkembangan dari bisnis yang tak terbatas dan semakin ketat.

Dengan berkembangnya teknologi dan sarana informasi yang ada saat ini, banyak perusahaan – perusahaan milik Negara maupun swasta yang bermunculan. Pada umumnya setiap perusahaan memiliki tujuan yaitu memperoleh suatu keuntungan.

Sejalan dengan adanya pelaksanaan dari otonomi daerah, akuntansi sektor publik di Indonesia mengalami suatu perkembangan, kemudian selain sebagai sistem yang digunakan oleh pemerintah daerah dalam mengelola keuangan daerah digunakan sebagai bentuk pertanggungjawaban pemerintah kepada publiknya. Jadi akuntabilitas merupakan kewajiban untuk memberikan pertanggungjawaban serta menjelaskan kinerja, tindakan seseorang, pimpinan organisasi kepada pihak lain yang memiliki hak dan kewajiban untuk suatu pertanggung jawaban keterangan.

Untuk mewujudkan akuntabilitas dan transparansi pada laporan keuangan pemerintah daerah harus memenuhi Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintah (PSAP) yang sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010. Laporan keuangan yang dihasilkan oleh pemerintah daerah digunakan untuk pengambilan dari keputusan, dan laporan keuangan pemerintah harus disajikan dan dilaporkan sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintah yang diterima secara umum.

Tujuan dari adanya pengendalian intern yaitu mendapatkan data yang terpecah dan juga tepat (sesuai), melindungi aktiva yang dimiliki oleh perusahaan, meningkatkan efektivitasan oleh semua anggota perusahaan sehingga perusahaan akan berjalan sesuai tujuan yang telah ditetapkan. Dari tujuan yang akan dicapai

melalui pelaksanaan pengendalian ialah adanya perangkat bagi manajernya untuk memotivasi dan megarahkan bawahannya supaya mereka bisa bekerja mencapai tujuan organisasi serta menyediakan umpan balik untuk manajernya mengenai seberapa baiknya kinerja dari para bawahannya.

Sistem pengendalian internal didapat dari adanya prosedur dan kebijakan yang dibuat untuk memberikan kebenaran yang layak untuk manajemen bahwa perusahaan telah mencapai tujuan dan sasarnya secara tepat. Manajemen memiliki tujuan umum dalam merancang sistem pengendalian internal yang efektif, yaitu efisiensi dan efektivitas operasi, keandalan pelaporan keuangan, peraturan pengeluaran kas yang dilakukan oleh perusahaan serta ketaatan dalam hukum, maka semakin bisa dipercaya besarnya akun kas yang telah dilaporkan kepada laporan keuangan perusahaan.

Salah satu dari sistem yang dapat digunakan oleh perusahaan yaitu sistem akuntansi dari penerimaan dan pengeluaran kas. Dalam sistem penerimaan dan pengeluaran kas diperlukan prosedur yang baik nantinya akan sesuai oleh kebijakan manajemen yang sudah ditetapkan. Dari penerimaan dan pengeluaran kas yang dilakukan diluar dari prosedur yang telah ditetapkan, dapat menimbulkan terjadinya pencurian, penggelapan serta penyelewengan kas. Bisa disimpulkan yaitu dengan adanya prosedur prosedur yang baik mengenai penerimaan dan pengeluaran kas yang dilakukan oleh perusahaan, maka dari itu semakin dapat dipercaya besarnya akun kas dari yang dilaporkan pada laporan keuangan perusahaan. Di samping itu, tingkat penyelewengan dan penggelapan kas akan dapat diminimalisir dan ditelusuri.

Pengendalian penerimaan dan pengeluaran kas adalah mekanisme dari pengendalian perusahaan dan sumber secara efektif untuk menyediakan laporan keuangan, terdapat manfaat dalam memprediksi dari konsekuensi yang nantinya akan timbul dari aktivitas dan tindakan yang mungkin untuk dilakukan. Pengendalian penerimaan dan pengeluaran kas secara baik dapat menghasilkan data dari laporan keuangan yang baik nantinya. Karna sebab itu pihak perusahaan dapat melakukan evaluasi dari sistem penerimaan dan pengeluaran kas yang mereka gunakan supaya sistem yang sudah digunakan selama ini dapat sesuai dengan tuntutan kondisi perusahaan dan kebutuhannya (Mario, Ventje, dan Stanley, 2015)

Berdasarkan Peraturan Pemerintahan Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah bahwa salah satu perumpamaan urusan yang didasarkan dalam bentuk dinas adalah bidang pendapatan, pengelolaan keuangan dan asset. Kemudian menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 41 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah khususnya pada bidang pendapatan, pengelolaan keuangan dan asset, dapat dikembangkan sesuai dengan prinsip-prinsip dari organisasi terdapat fungsi lini dan staf, yaitu pendapat menjadi dinas pendapatan dan pengelolaan keuangan dan Asset menjadi Biro Keuangan dan Biro Perlengkapan. Selanjutnya pada Pemendagri Nomor 41 Tahun 2007 dapat dijelaskan bahwa dinas daerah yang harus dibentuk salah satunya yaitu Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset. Dikarenakan pada tahun 2008 dan sebelumnya fungsi pengelolaan keuangan dan barang daerah lebih melekat pada Sekretariat Daerah yang dilaksanakan oleh Bagian Keuangan dan Bagian Pengelolaan Barang Daerah.

Toptime (2018) Dalam kasusnya pada Badan Pemeriksaan Keuangan (BPK) Perwakilan Jabar mengeluarkan hasil pemeriksaan atas sistem pengendalian internal pada Pemerintah Kota Bekasi Tahun Anggaran (TA) 2018. Berdasarkan hasil pemeriksaan BPK atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Kota Bekasi TA 2016 No:3SB/LHP/XV111.BDG/05/2018 tanggal 23 Mei 2018 diungkapkan terjadi permasalahan terkait adanya selisih pencatatan diantara Bidang Perbendaharaan dengan pihak bank. Selisih tersebut terjadi karena transaksi antar rekening kas daerah tidak dicatat dalam form Bend IX sehingga transaksi rekening koran selalu lebih besar dibandingkan pencatatan pada form Bend IX.

Atas permasalahan tersebut BPK merekomendasikan walikota Bekasi supaya menginstruksikan kepala BPKAD untuk melakukan rekonsiliasi secara berkala serta melakukan perintah kepada bidang perbendaharaan untuk mencatat seluruh transaksi keuangan secara lengkap dalam laporan posisi keuangan kas hariannya. Kemudian Kepala Bidang Perbendaharaan selaku kuasa Beasiswa Utusan Daerah (BUD) tidak melakukan penatausahaan Kas Daerah secara tertib.

Dalam melakukan penatausahaan kas daerah, laporan yang dimiliki oleh kuasa BUD hanya laporan posisi kas harian. Kuasa BUD tersebut tidak membuat Buku Kas Umum (BKU) maupun catatan penunjang lainnya seperti buku kas

penerimaan dan pengeluaran, buku bank. Laporan posisi kas yang dibuat oleh kuasa BUD hanya mencatat transaksi – transaksi penerimaan dan pengeluaran kas pada rekening penerima, kuasa BUD tidak mencatatnya di laporan posisi kas harian.

Jadi pencatatan yang dilakukan atas rekening penerimaan hanya berdasarkan saldo akhir pada rekening yang digunakan untuk menghitung jumlah kas daerahnya setelah ditambah saldo pada Rekening Kas Umum Daerah (RKUD). Dengan tidak tercatatnya seluruh transaksi mengakibatkan terjadinya perbedaan pencatatan antara BPKAD dan pihak Bank.

Apabila hal ini terjadi maka hal tersebut sangat rentan terjadinya penyelewengan kas. Masalah ini perlu diperhatikan dengan sesama dan apabila hal ini terjadi maka dapat dikatakan bahwa pengendalian intern penerimaan dan pengeluaran kas tidak baik. Pengendalian intern yang baik nantinya akan menghasilkan informasi yang benar, dapat memberikan gambaran yang jelas tentang aktiva yang perlu diawasi, memungkinkan pimpinan dengan cara yang lebih efektif, dan sekaligus mengatur pekerjaan pada saat ini serta membuat rencana kerja yang akan datang nantinya. Dengan demikian segala kegiatan operasional akan dapat diawasi dengan baik.

Berdasarkan uraian diatas penulis tertarik menentukan bagaimana pengendalian internal kas yang diterapkan pada Bapenda Kota Bekasi. Dengan ini penulis mengambil judul **“Analisis Pengendalian Internal Berbasis Coso Pada Sistem Penerimaan Dan Pengeluaran Kas Di Bapenda”**

1.2 Rumusan Permasalahan

Berdasarkan latar belakang yang telah dijelaskan, maka dirumuskan suatu permasalahan yang akan menjadi pokok pembahasan dalam penelitian ini, yaitu :

1. Bagaimana sistem penerimaan dan pengeluaran kas yang ada di Bapenda ?
2. Apakah pengendalian internal pada sistem penerimaan dan pengeluaran kas yang ada di Bapenda sesuai dengan komponen pengendalian internal menurut *Commite of Sponsoring Organization of Treadway Commission (COSO)* ?
3. Apakah pengendalian internal pada sistem penerimaan dan pengeluaran kas yang diterapkan di Bapenda sudah efektif ?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah ditetapkan diatas, maka penelitian ini bertujuan untuk :

1. Untuk mengetahui sistem penerimaan dan pengeluaran kas yang ada di Bapenda.
2. Untuk mengetahui apakah pengendalian internal pada sistem penerimaan dan pengeluaran kas yang ada di Bapenda sesuai dengan komponen pengendalian internal COSO.
3. Untuk mengetahui apakah pengendalian internal pada sistem penerimaan dan pengeluaran kas yang diterapkan di Bapenda sudah efektif.

1.4 Manfaat Penelitian

Dari hasil yang telah diperoleh diharapkan dapat memberikan manfaat bagi semua pihak yang berkepentingan dan berhubungan dengan penelitian antara lain :

1. Bagi Penulis.

Dari penelitian ini diharapkan akan menambahkan ilmu pengetahuan, wawasan dan penerapannya ke dalam dunia praktek Audit khususnya tentang Analisis Penerapan Pengendalian Internal Terhadap Efektivitas Penerimaan dan Pengeluaran Kas. Serta dapat digunakan untuk membandingkan dan menerapkan ilmu yang telah diperoleh pada saat kuliah dengan kenyataan dilapangan.

2. Bagi Universitas.

Memberikan beberapa informasi kepada pihak lain untuk melakukan penelitian lebih lanjut dan dapat menambah kepustakaan sebagai informasi bahan perbandingan bagi peneliti lain untuk wujud Universitas Bhayangkara Jakarta Raya umumnya dan Fakultas Ekonomi pada khususnya program studi Akuntansi.

1.5 Batasan Masalah

Dalam penulisan skripsi ini, penulis memberikan batasan masalah yang dilakukan berkaitan dengan Analisis pengendalian internal berbasis COSO pada sistem penerimaan dan pengeluaran kas. Data yang diteliti ini pada tahun 2019 - 2020, sehingga pembatasan dari suatu masalah digunakan untuk menghindari adanya penyimpangan dari permasalahan yang diidentifikasi. Jadi penelitian tersebut dapat lebih terarah dan memudahkan dalam melakukan pembahasan sehingga tujuan penelitian dapat tercapai sesuai yang diharapkan.

1.6 Sistematika Penulisan

Untuk mempermudah dalam penulisan dan mendapatkan gambaran secara ringkas mengenai skripsi ini, maka system penulisannya dibagi dalam lima bab yang secara garis besar disusun sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini membahas tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, batasan masalah, dan sistem penulisan.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini terdiri dari landasan teori yang menguraikan teori – teori yang digunakan sebagai tinjauan atau landasan dalam menganalisis batasan masalah yang telah ditemukan kemudian kerangka berfikir dan hipotesis.

BAB III METODOLOGI PENELITIAN

Bab ini berisi tentang desain penelitian, tahapan penelitian, model konseptual penelitian, operasional variabel, populasi, sampel, metode pengumpulan data dan metode analisis data.

BAB IV ANALISIS PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Bab ini berisi tentang hasil dan pembahasan yang menguraikan tentang diskripsi dari objek penelitian, hasil analisis data dan pembahasan hasil penelitian.

BAB V PENUTUP

Bab ini berisi tentang kesimpulan dari penelitian yang dilakukan dan implikasi manajerial untuk penelitian selanjutnya yang dianggap sama.

